



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

LAPORAN HASIL EVALUASI SPBE TAHUN 2024

PEMERINTAH KAB. WONOSOBO



Sinergi untuk Indonesia Maju

KATA PENGANTAR

Puji syukur dihaturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga seluruh agenda tahapan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dapat dilaksanakan pada Tahun 2024. Pelaksanaan kegiatan evaluasi SPBE merupakan amanat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dikoordinasikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan tujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Besar harapan kami bahwa hasil evaluasi SPBE tahun 2024 dapat menggambarkan progres kemajuan penerapan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, sehingga memberikan panduan bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk peningkatan penerapan SPBE dalam rangka keterpaduan penerapan SPBE yang selaras dengan kebijakan nasional. Dengan semangat tersebut, maka dampak terciptanya layanan SPBE berkualitas, terintegrasi, dan berdaya guna yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta bermanfaat bagi masyarakat luas dapat diwujudkan secara konkret.

Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya atas upaya yang telah dilakukan oleh seluruh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk terus meningkatkan progres penerapan SPBE, serta sinergi yang baik antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk Kementerian/Lembaga anggota Tim Koordinasi SPBE Nasional dan Tim Asesor Eksternal Perguruan Tinggi, sehingga pelaksanaan Evaluasi SPBE tahun 2024 dapat dilaksanakan dengan baik dan berjalan lancar.

Jakarta, 1 Januari 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh :

NANIK MURWATI

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata
Laksana

NIP. 197208081996032001

EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2024

Ringkasan Eksekutif

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Evaluasi SPBE. Pada tahun 2024, telah dilaksanakan Evaluasi SPBE dengan menggunakan instrumen sebagaimana telah diatur melalui Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

Hasil pelaksanaan evaluasi SPBE yang dilakukan pada tahun 2024 sebagaimana terlampir dalam Laporan Hasil Evaluasi SPBE ini, diharapkan dapat dimanfaatkan dalam menentukan arah tindak lanjut yang harus dilakukan dalam mendorong peningkatan penerapan SPBE secara menyeluruh pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah di masa mendatang, dalam rangka meningkatkan kualitas layanan SPBE kepada masyarakat dan terwujudnya Pemerintah Digital dalam kerangka Transformasi Digital Pemerintah.

Dasar Hukum

- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Metodologi Evaluasi SPBE

Penerapan SPBE diukur dengan model tingkat kematangan SPBE, di mana setiap tingkat kematangan akan dideskripsikan dengan suatu kriteria yang menggambarkan karakteristik kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE yang terdiri atas 5 (lima) tingkatan, di mana semakin tinggi tingkat kematangan yang dimiliki oleh Instansi Pusat/Pemerintah Daerah menunjukkan semakin tinggi kapabilitas Instansi Pusat/Pemerintah Daerah tersebut.

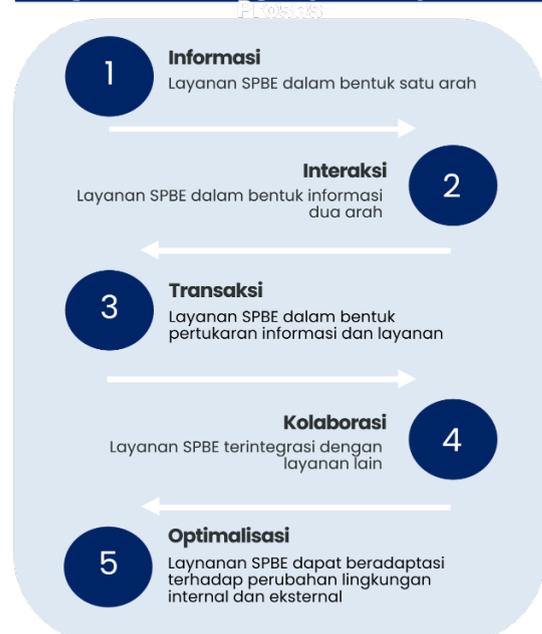
Penilaian evaluasi SPBE didasarkan pada data dan informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui beberapa tahapan kegiatan, yaitu Penilaian Mandiri, Penilaian Dokumen, Penilaian Interview, serta Penilaian Visitasi (pada lokus tertentu).

Tingkat Kematangan Penerapan SPBE

Tingkat Kematangan pada Kapabilitas Proses



Tingkat Kematangan pada Kapabilitas Fungsi



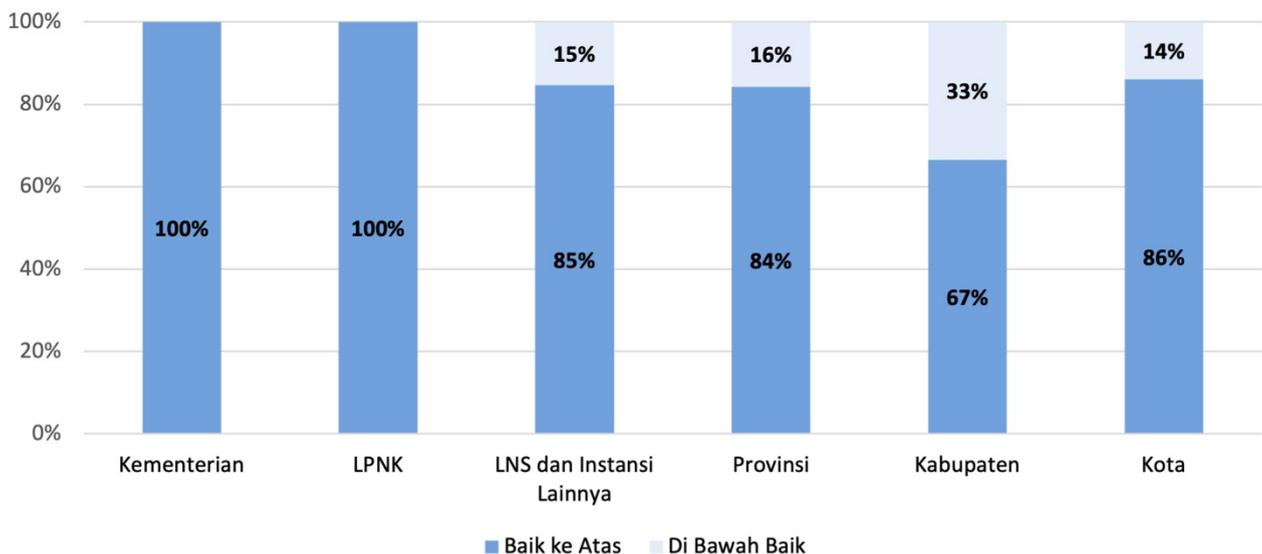
EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2024

Domain dan Aspek Penilaian	Bobot	Predikat Indeks SPBE																				
Domain 1 - Kebijakan SPBE	13%	<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>NILAI INDEKS</th> <th>PREDIKAT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>4,2 – 5,0</td> <td>Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>3,5 – < 4,2</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2,6 – < 3,5</td> <td>Baik *)</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>1,8 – < 2,6</td> <td>Cukup</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>< 1,8</td> <td>Kurang</td> </tr> </tbody> </table>	NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT	1	4,2 – 5,0	Memuaskan	2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik	3	2,6 – < 3,5	Baik *)	4	1,8 – < 2,6	Cukup	5	< 1,8	Kurang		
NO	NILAI INDEKS		PREDIKAT																			
1	4,2 – 5,0		Memuaskan																			
2	3,5 – < 4,2		Sangat Baik																			
3	2,6 – < 3,5		Baik *)																			
4	1,8 – < 2,6		Cukup																			
5	< 1,8		Kurang																			
Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	13%																					
Domain 2 - Tata Kelola SPBE	25%																					
Aspek 2 - Perencanaan Strategis	10%																					
Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi	10%																					
Aspek 4 - Penyelenggaraan SPBE	5%																					
Domain 3 - Manajemen SPBE	16,5%																					
Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE	12%																					
Aspek 6 - Audit TIK	4,5%																					
Domain 4 - Layanan SPBE	45,5%																					
Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	27,5%																					
Aspek 8 - Layanan Publik	18%																					

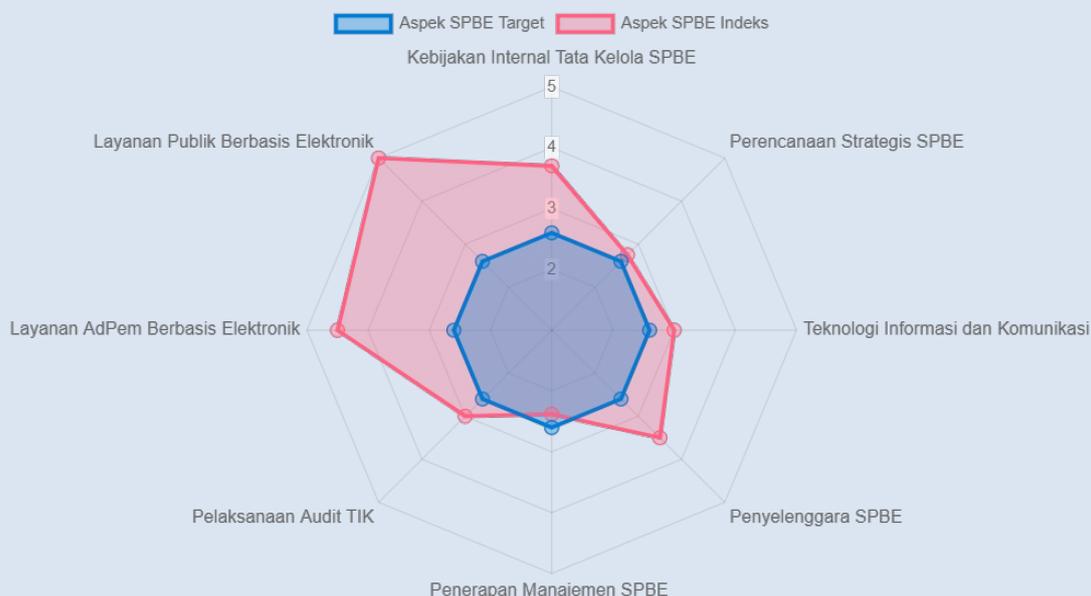
*) Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)

Indeks	Rata-Rata Nilai						
	Nasional	Kementerian	LPNK	LNS dan Instansi Lainnya	Provinsi	Kabupaten	Kota
SPBE	3,12	4,03	3,82	3,37	3,42	2,45	3,39
Domain Kebijakan	3,36	4,28	4,01	3,61	3,61	2,51	3,64
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	3,36	4,28	4,01	3,61	3,61	3,23	3,64
Domain Tata Kelola	2,62	3,92	3,65	3,11	3,07	1,69	2,94
Perencanaan Strategis	2,41	3,74	3,68	3,01	2,84	1,54	2,60
Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,75	4,06	3,75	3,11	3,26	1,76	3,10
Penyelenggaraan SPBE	2,80	4,00	3,40	3,32	3,14	1,85	3,31
Domain Manajemen	1,86	2,87	2,61	2,31	2,17	1,13	2,03
Penerapan Manajemen SPBE	1,91	2,96	2,68	2,38	2,19	1,16	2,09
Audit TIK	1,73	2,64	2,44	2,13	2,12	1,07	1,88
Domain Layanan SPBE	3,78	4,44	4,26	3,81	3,98	3,32	4,05
Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,77	4,35	4,20	3,90	3,95	3,40	3,99
Layanan Publik Berbasis Elektronik	3,80	4,58	4,36	3,67	4,04	3,21	4,15

Distribusi Indeks SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Predikat Tahun 2024



Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek



Nama Indeks	Nilai 2024
SPBE	3,79
Domain Kebijakan SPBE	3,70
<i>Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE</i>	<i>3,70</i>
Domain Tata Kelola SPBE	3,00
<i>Perencanaan Strategis SPBE</i>	<i>2,75</i>
<i>Teknologi Informasi dan Komunikasi</i>	<i>3,00</i>
<i>Penyelenggara SPBE</i>	<i>3,50</i>
Domain Manajemen SPBE	2,55
<i>Penerapan Manajemen SPBE</i>	<i>2,38</i>
<i>Audit TIK</i>	<i>3,00</i>
Domain Layanan SPBE	4,70
<i>Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik</i>	<i>4,50</i>
<i>Layanan Publik Berbasis Elektronik</i>	<i>5,00</i>

KEKUATAN DAN KELEMAHAN

A. Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo adalah tersedianya kebijakan internal terkait dengan Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, Manajemen Data, Pembangunan Aplikasi SPBE, Layanan Pusat Data, Layanan Jaringan Intra, Penggunaan Sistem Penghubung Layanan, Manajemen Keamanan Informasi, Audit TIK, dan Tim Koordinasi SPBE

- Kekuatan
Pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE ini dapat terlihat telah tersedianya kebijakan internal Arsitektur SPBE, Manajemen Data, Layanan Jaringan Intra, Penggunaan Sistem Penghubung Layanan, dan Manajemen Keamanan Informasi. menjadi kekuatan dalam implementasi penerapan kebijakan SPBE pada Pemerintah Kabupaten Wonosobo. Setiap indikator telah didukung dengan kebijakan dan selalu direview secara periodik serta diperbarui kebijakannya, sebagai contohnya adalah SK Bupati Wonosobo Nomor 500.12.6/191/2023 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, merupakan kebijakan turunan dari Peraturan Bupati No. 37 Tahun 2022 dan menindaklanjuti kebijakan internal Arsitektur SPBE. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 23 Tahun 2018 tentang SPBE di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo, yang merupakan kebijakan Arsitektur SPBE sebelumnya. SK Bupati Wonosobo Nomor 500.12.6/190/2023 tentang Peta Rencana SPBE Kabupaten Wonosobo, yang merupakan kebijakan turunan dari Peraturan Bupati No. 37 Tahun 2022, dan menindaklanjuti kebijakan internal Peta Rencana SPBE. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 23 Tahun 2018 tentang SPBE di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo, yang merupakan kebijakan Arsitektur SPBE sebelumnya
- Kelemahan
Pemerintah Kabupaten Wonosobo belum memiliki kelemahan pada aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE

B. Perencanaan Strategis SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Perencanaan Strategis SPBE yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo adalah tersedianya dokumen Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE, dan Inovasi Proses Bisnis SPBE.

- Kekuatan
Pada Aspek Perencanaan Strategis SPBE ini dapat terlihat telah tersedianya dokumen internal Arsitektur SPBE, dan Inovasi Proses Bisnis SPBE. yang menjadi kekuatan dalam implementasi tatakelola penerapan dokumen SPBE pada Pemerintah Kabupaten Wonosobo. Arsitektur SPBE di Kabupaten Wonosobo telah disusun secara komprehensif dan terdokumentasi dalam dua buku yang memaparkan kondisi eksisting dan target yang ingin dicapai. Dokumen-dokumen ini menjelaskan secara mendetail berbagai referensi dan domain yang menjadi tulang punggung Arsitektur SPBE, meliputi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur, aplikasi, keamanan, serta layanan yang terintegrasi dalam sistem. Dengan pemahaman yang jelas tentang setiap elemen ini, diharapkan implementasi SPBE dapat dilakukan secara efisien dan terstruktur. Kondisi target arsitektur SPBE 2022-2026, memuat secara lengkap arsitektur SPBE. Pemkab Daerah telah mendokumentasikan Proses Bisnis seluruh perangkat daerah. Penyusunannya mengacu pada Permenpan RB 19/2018 dan Perbub No. 51 Tahun 2021. Proses Bisnis ini telah direviu oleh Kemenpan, sebagaimana. Selain itu, dilakukan konsultasi dan pelatihan mengenai arsitektur Proses Bisnis SPBE berdasarkan SIA SPBE Versi 2.
- Kelemahan
Pemerintah Kabupaten Wonosobo belum memiliki kelemahan pada aspek Perencanaan Strategis SPBE

C. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo adalah tersedianya dokumen Pembangunan Aplikasi SPBE, Layanan Pusat Data, Layanan Jaringan Intra, dan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan.

- Kekuatan
Pemerintah Kabupaten Wonosobo masih belum memiliki kekuatan pada aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi
- Kelemahan
Pemerintah Kabupaten Wonosobo belum memiliki kelemahan pada aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi

D. Penyelenggara SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Penyelenggara SPBE yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo adalah tersedianya dokumen Tim Koordinasi SPBE, dan Kolaborasi Penerapan SPBE.

- Kekuatan
Pada Aspek Penyelenggara SPBE ini dapat terlihat telah tersedianya dokumen internal Tim Koordinasi SPBE, dan Kolaborasi Penerapan SPBE. yang menjadi kekuatan dalam implemtasi tatakelola penerapan dokumen SPBE pada Pemerintah Kabupaten Wonosobo. Tim Koordinasi SPBE Kabupaten Wonosobo, yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati terbaru tahun 2023, telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan Kepmenpan-RB No. 965 Tahun 2021. Tim ini mengoordinasikan dan mengomunikasikan program kerja SPBE kepada seluruh perangkat daerah melalui rapat koordinasi yang terstruktur. Selain itu, tim melakukan evaluasi dan reviu kebijakan untuk mengidentifikasi kekurangan, memperbaiki, dan mengembangkan pelaksanaan SPBE secara berkelanjutan, guna memastikan implementasi yang optimal di tingkat daerah. Kolaborasi antara Pemkab Wonosobo dan berbagai pihak, termasuk BPS, PPSID, serta OPD terkait, menunjukkan langkah strategis dalam mendukung pengembangan Satu Data dan penerapan SPBE di tingkat daerah hingga desa. Upaya ini mencakup pengumpulan dan pengelolaan data berbasis digital, integrasi layanan publik, serta penguatan infrastruktur digital melalui portal layanan terpadu. Pemerintah daerah juga secara rutin mengoordinasikan forum kolaborasi SPBE, melakukan evaluasi, dan reviu kebijakan untuk memastikan implementasi yang efektif, adaptif, dan berkelanjutan
- Kelemahan
Pemerintah Kabupaten Wonosobo belum memiliki kelemahan pada aspek Penyelenggara SPBE

E. Penerapan Manajemen SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Penerapan Manajemen SPBE yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo adalah telah dilaksanakannya Penerapan Manajemen Risiko SPBE, Penerapan Manajemen Keamanan Informasi, Penerapan Manajemen Data, Penerapan Manajemen Aset TIK, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Manajemen Pengetahuan, Penerapan Manajemen Perubahan, dan Penerapan Manajemen Layanan SPBE.

- Kekuatan
Pada Aspek Penerapan Manajemen SPBE ini dapat terlihat telah terlaksananya implemntasi manajemen Penerapan Manajemen Keamanan Informasi, Penerapan Manajemen Data, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia. sebagai kekuatan dalam implementasi penerapan manajemen SPBE pada Pemerintah Kabupaten Wonosobo. Pemkab Wonosobo telah menyusun strategi pengelolaan data dan keamanan informasi yang komprehensif melalui kebijakan, prosedur, dan perangkat pendukung. Strategi ini mencakup pengelolaan sistem informasi, pengamanan data melalui sertifikat SSL, penerapan sistem deteksi intrusi, pembentukan tim respons insiden siber (CSIRT), dan pelaksanaan evaluasi keamanan ITSA. Selain itu, Pemkab juga mengedukasi pengguna terkait keamanan informasi dan menerapkan sistem manajemen keamanan informasi (SMKI) berbasis regulasi. Semua upaya ini dirancang untuk memastikan pengelolaan data yang aman, terpadu, dan berkelanjutan, dengan reviu serta evaluasi berkala. Pemkab Wonosobo juga telah melaksanakan manajemen data secara terintegrasi melalui regulasi, prosedur operasional, dan infrastruktur berbasis Satu Data Indonesia (SDI). Upaya ini mencakup penerbitan Perbup Satu Data, pedoman standar data dan metadata, serta pembentukan tim penyelenggara dan pengelola data di perangkat daerah. Data dikumpulkan, diverifikasi, dan disebarluaskan melalui portal Gardu Perencanaan dan portal Satu Data Wonosobo, yang terhubung dengan SDI Nasional. Forum SDI rutin diadakan untuk membahas reviu tahunan, perbaikan arsitektur data, serta penetapan daftar data prioritas. Inisiatif pendukung lainnya termasuk program Desa Cantik, integrasi data sektoral, dan permohonan data ke Bappenas untuk pengambilan keputusan berbasis data. Pemkab juga melakukan reviu dan evaluasi secara berkala. Tindak lanjutnya meliputi penyusunan pengelolaan dan perbaikan arsitektur data, serta pengembangan rekomendasi untuk kegiatan statistik.
- Kelemahan
Pemerintah Kabupaten Wonosobo belum memiliki kelemahan pada aspek Penerapan Manajemen SPBE

F. Pelaksanaan Audit TIK

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Audit TIK yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo adalah telah dilaksanakannya Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE, Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE, dan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE.

- Kekuatan
Pemerintah Kabupaten Wonosobo masih belum memiliki kekuatan pada aspek Audit TIK
- Kelemahan
Pemerintah Kabupaten Wonosobo belum memiliki kelemahan pada aspek Audit TIK

G. Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo adalah telah diimplementasikannya aplikasi layanan untuk Perencanaan, Penganggaran, Keuangan, Pengadaan Barang dan Jasa, Kepegawaian, Kearsipan, Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pengawasan Internal terkait Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja Organisasi, dan Kinerja Pegawai.

- Kekuatan
Pada Aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik ini dapat terlihat telah terlaksananya implementasi manajemen Perencanaan, Penganggaran, Keuangan, Pengadaan Barang dan Jasa, Kepegawaian, Kearsipan, dan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. sebagai kekuatan dalam implementasi penerapan aplikasi layanan SPBE pada Pemerintah Kabupaten Wonosobo. Aplikasi SIPD di Pemkab Wonosobo mendukung akses informasi yang cepat dan mudah, memfasilitasi perencanaan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Reviu aplikasi ini menghasilkan sejumlah rekomendasi perbaikan yang telah ditindaklanjuti, menunjukkan komitmen Bappeda dalam meningkatkan kualitas layanan. Upaya sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan pengguna juga dilakukan untuk memastikan pemanfaatan aplikasi secara optimal. Layanan Penganggaran berbasis elektronik di Pemkab Wonosobo telah mencapai tingkat kematangan optimal melalui penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019. SIPD digunakan oleh BPPKAD untuk mendukung proses penganggaran secara elektronik di seluruh lingkup Pemkab. Aplikasi ini telah dievaluasi secara menyeluruh untuk memastikan fungsionalitasnya memenuhi kebutuhan daerah serta mendukung transparansi dan efisiensi penganggaran. Hasil evaluasi menjadi dasar untuk perbaikan aplikasi, dengan koordinasi lebih lanjut dilakukan bersama Kemendagri untuk memastikan implementasi yang optimal. Layanan keuangan berbasis elektronik di Pemkab Wonosobo telah mencapai tingkat kematangan optimal melalui penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang dikembangkan oleh Kemendagri. SIPD digunakan oleh BPPKAD untuk mendukung pengelolaan keuangan secara elektronik sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019. Selain itu, inovasi lain seperti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) melalui platform e-commerce telah diterapkan untuk mempermudah pelayanan pajak. Aplikasi SIPD juga telah dievaluasi untuk meningkatkan efektivitasnya, dengan hasil reviu dan rekomendasi yang dikordinasikan dengan Kemendagri. Sosialisasi dan pelatihan terus dilakukan untuk memastikan seluruh perangkat daerah dapat memanfaatkan aplikasi ini secara optimal. Penerapan layanan Pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Wonosobo telah mencapai tingkat kematangan optimal melalui implementasi LPSE yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) milik LKPP. Layanan ini diperkuat oleh Instruksi Bupati terkait percepatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN) dan e-katalog lokal, yang terus dioptimalkan melalui sosialisasi serta pendaftaran produk lokal baru. Surat Edaran Sekda juga dikeluarkan untuk mendorong partisipasi penyedia lokal. Evaluasi berkala terhadap LPSE dilakukan, dengan hasil reviu yang menghasilkan rekomendasi pembaruan, termasuk peningkatan sistem ke versi 4.5. Penerapan layanan kepegawaian berbasis elektronik di Kabupaten Wonosobo telah mencapai tingkat kematangan optimal melalui implementasi Simpeg, yang dapat diakses di <https://simpeg.wonosobokab.go.id>. Aplikasi ini mendukung fitur pencarian, pengunduhan, pengunggahan, persetujuan, serta integrasi basis data, dan telah terhubung dengan e-Presensi dan SI-ASN milik BKN, menunjukkan keselarasan dengan sistem kepegawaian nasional. Pemkab Wonosobo juga memprioritaskan pengembangan Simpeg, termasuk perencanaan modul e-Hukdis untuk disiplin pegawai dan layanan manajemen talenta yang terintegrasi. Penerapan layanan kearsipan dinamis berbasis elektronik di Pemkab Wonosobo telah mencapai tingkat kematangan optimal melalui aplikasi Srikandi, yang dikelola oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah. Aplikasi ini dapat diakses di <https://srikandi.arsip.go.id> dan dilengkapi dengan fitur seperti pencarian, pengunggahan, pengunduhan, serta verifikasi dokumen. Implementasi Srikandi didukung oleh pembentukan tim kerja, penerbitan Surat Edaran Sekda, serta bimbingan teknis kepada perangkat daerah. Untuk menjaga kualitas layanan, aplikasi ini secara berkala diperbarui dan dievaluasi. Rekomendasi hasil reviu telah ditindaklanjuti, termasuk migrasi ke versi terbaru untuk memastikan aplikasi tetap relevan dalam mendukung kebutuhan kearsipan di lingkungan

Pemkab Wonosobo. Penerapan layanan pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) di Pemkab Wonosobo telah mencapai tingkat kematangan fungsi kolaborasi melalui penggunaan aplikasi Simda BMD yang dikelola oleh BPPKAD. Aplikasi ini menyediakan fitur seperti pengunggahan dan pengunduhan dokumen, pencarian data, serta verifikasi yang mendukung berbagai proses administrasi aset, termasuk pendataan, inventarisasi, dan sensus barang. Selain itu, penggunaan aplikasi mobile mempermudah proses inventarisasi barang secara efisien. Sistem ini mendukung transparansi dan akuntabilitas dengan mekanisme transaksi elektronik, seperti persetujuan dan validasi penghapusan barang. Dengan layanan ini, pengelolaan aset daerah menjadi lebih terstruktur, mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Bukti dukung menunjukkan bahwa layanan berbasis elektronik ini telah berjalan sesuai dengan standar pengelolaan BMD. Penerapan indikator Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai di Pemkab Wonosobo telah mencapai kapabilitas fungsi teknis optimum melalui penggunaan aplikasi e-Kinerja. Aplikasi ini dilengkapi dengan berbagai fitur seperti unggah/unduh dokumen, pencarian, validasi, dan integrasi dengan sistem lainnya, seperti e-Presensi dan e-Simpeg, yang memungkinkan sinkronisasi otomatis data kehadiran dan informasi pegawai. Sistem ini juga mendukung perhitungan Tunjangan Prestasi Pegawai (TPP) berdasarkan data kinerja dan kehadiran, sehingga penilaian kinerja ASN lebih akurat dan transparan. Optimalisasi aplikasi terus dilakukan, dengan laporan pengembangan dan evaluasi menunjukkan peningkatan fitur untuk mempermudah pengelolaan kinerja ASN. Integrasi dengan SI ASN dan SIMPEG Wonosobo memperkuat pengelolaan data pegawai secara terpusat dan efisien. Reviu serta tindak lanjut pengembangan fitur memastikan aplikasi tetap relevan dengan perubahan teknologi dan kebutuhan organisasi.

- Kelemahan
Pemerintah Kabupaten Wonsosobo belum memiliki kelemahan pada aspek Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

H. Layanan Publik Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Wonsosobo adalah telah diimplementasikannya aplikasi layanan untuk Pengaduan Pelayanan Publik, Data Terbuka, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Publik Sektor 1, 2, dan 3

- Kekuatan
Pada Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik ini dapat terlihat telah terlaksananya implementasi manajemen Pengaduan Pelayanan Publik, Data Terbuka, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Publik Sektor 1, 2, dan 3 sebagai kekuatan dalam implementasi penerapan aplikasi layanan SPBE pada Pemerintah Kabupaten Wonsosobo. Pengaduan Pelayanan Publik di Pemkab Wonosobo telah ditunjukkan melalui aplikasi Laporan Bupati yang dikelola oleh Diskominfo. Aplikasi ini dilengkapi dengan berbagai fitur, seperti unggah/unduh dokumen, pencarian, validasi, grafik, dan notifikasi WhatsApp, serta dapat diakses secara online. Aplikasi ini diatur berdasarkan Peraturan Bupati yang mengatur pengelolaan pengaduan masyarakat melalui media elektronik. Layanan ini juga memiliki standar operasional dan pedoman penggunaan yang memberikan panduan bagi admin dan pengguna dalam mengelola pengaduan. Selain itu, aplikasi ini terintegrasi dengan sistem SP4N Laporan Kemendagri RB, yang memperkuat kolaborasi antara Pemkab Wonosobo dan pemerintah pusat dalam pengelolaan pengaduan. Proses reviu terhadap aplikasi ini telah dilakukan, menghasilkan rekomendasi perbaikan yang telah ditindaklanjuti, dengan bukti perbaikan yang telah dilakukan. Penerapan Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka di Pemkab Wonosobo telah mencapai kapabilitas fungsi teknis optimum. Hal ini ditunjukkan melalui penerapan Layanan Data Terbuka berbasis elektronik yang dikelola oleh Diskominfo, meliputi aplikasi Open Data dan Satu Data, yang terintegrasi dengan berbagai fitur, seperti unggah/unduh, pencarian, validasi, dan grafik. Aplikasi Open Data dapat diakses melalui portal resmi, dengan pengembangan yang terus dilakukan, sebagaimana dibuktikan oleh dokumen pengembangan dan reviu berkala dari Forum SDI. Selain itu, integrasi dengan Portal SDI pusat telah dilakukan untuk meningkatkan keterhubungan data di tingkat nasional. Di tingkat desa, layanan Satu Data berbasis ""Desa Cantik"" diterapkan melalui portal OpenSID, yang menjadi platform data terbuka di tingkat desa. Pedoman pelaksanaan Satu Data di desa didasarkan pada Surat Edaran Bupati, dan dilengkapi dengan fitur serupa untuk mempermudah pengelolaan data. Reviu dan pengembangan aplikasi ini dilakukan secara terus-menerus, mencerminkan komitmen Pemkab Wonosobo untuk mengoptimalkan fungsi teknis layanan data terbuka serta mendukung integrasi data. Penerapan Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) di Pemkab Wonosobo telah mencapai kapabilitas fungsi teknis optimum. Hal ini tercermin dari peluncuran Layanan JDIH yang dapat diakses melalui aplikasi di <https://jdih.wonosobokab.go.id/>. Aplikasi ini terintegrasi dengan JDIHN (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional) serta JDIH

tingkat desa, dan dilengkapi dengan dokumentasi seperti manual penggunaan serta informasi mengenai integrasi. Layanan JDIH Pemkab Wonosobo telah diakui dengan penghargaan sebagai layanan terbaik di tingkat provinsi dan nasional, yang menunjukkan komitmen Pemkab dalam menyediakan akses informasi hukum yang berkualitas. Pemkab Wonosobo juga terus melakukan optimalisasi pemanfaatan aplikasi ini, menindaklanjuti rekomendasi perbaikan yang dihasilkan dari revidu. Beberapa tindak lanjut meliputi pengembangan fitur untuk disabilitas dan pembaruan portal yang sudah berhasil diimplementasikan. Aplikasi JDIH ini dilengkapi dengan fitur seperti pencarian, unduh, unggah, dan integrasi database yang telah direvidu dan dievaluasi dan ditindaklanjuti. Penerapan Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektoral 1 di Kabupaten Wonosobo telah mencapai kapabilitas fungsi optimalisasi, yang dapat dilihat dari implementasi Layanan Publik Sektor 1 melalui aplikasi PPDB Online. Aplikasi ini dikelola oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dan dapat diakses di <https://ppdb SMP.wonosobokab.go.id/>. Penerapan aplikasi ini didasarkan pada Peraturan Bupati No. 36 Tahun 2022, serta dokumen terkait yang mencakup panduan penggunaan untuk berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses pendaftaran. Aplikasi PPDB Online mendukung proses pendaftaran siswa baru dengan penetapan zonasi sekolah yang mempermudah pendaftaran siswa. Aplikasi ini memiliki fitur penting seperti pencarian, pengunduhan, pengunggahan, approval, dan integrasi database, yang memperlancar proses bagi pengguna. Revidu dan pengembangan aplikasi terus dilakukan untuk memastikan kesesuaiannya dengan kebutuhan pengguna dan perkembangan teknologi, yang dibuktikan dengan adanya dukungan anggaran untuk pengembangan aplikasi pada DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) sebesar Rp 83.904.200 untuk PPDB SD dan Rp 89.500.000 untuk PPDB SMP. Pemerintah Kabupaten Wonosobo telah menerapkan layanan pengajuan izin berusaha berbasis risiko melalui aplikasi OSS yang terintegrasi dengan sistem pusat, menyediakan fitur seperti upload/download, pencarian, dan validasi. Selain itu, layanan perizinan non-berusaha dikelola melalui aplikasi APRIZOB, yang dilengkapi fitur notifikasi, tracking, dan integrasi perpajakan daerah. Kedua aplikasi ini mendukung Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital dan terus diperbarui sesuai kebutuhan, dengan anggaran pengembangan yang jelas. Pemkab Wonosobo juga telah mengoptimalkan layanan untuk mendukung Reformasi Birokrasi dan prioritas Presiden.

- Kelemahan

Pemerintah Kabupaten Wonsosobo belum memiliki kelemahan pada aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik

REKOMENDASI

Secara prinsip, dengan adanya implementasi kebijakan internal, tata kelola, manajemen dan layanan SPBE akan mendorong peningkatan penerapan SPBE pada Kabupaten Wonosobo. Adapun dari hasil evaluasi SPBE yang telah dilakukan terhadap Kabupaten Wonosobo, sudah dapat menggambarkan predikat SANGAT BAIK dalam penerapan SPBE, sebagaimana terdapat beberapa keunggulan dan kelemahan

Keunggulan penerapan SPBE yang dimiliki oleh Kabupaten Wonosobo adalah pada penerapan Aspek Layanan Publik Berbasis Elektronik. Keunggulan ini terlihat dari dengan adanya Pengaduan Pelayanan Publik, Data Terbuka, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), Publik Sektor 1, 2, dan 3. Seluruh keunggulan tersebut saling terkait, sehingga dapat memberikan gambaran pelaksanaan SPBE di internal Kabupaten Wonosobo menjadi efektif dan efisien, dan Pemerintah Kabupaten Wonosobo telah mengimplementasikan berbagai aplikasi layanan publik berbasis elektronik yang memberikan peluang besar untuk meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat. Aplikasi SPAN LAPOR memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan pengaduan terkait pelayanan publik secara langsung dan transparan, yang mempermudah pemerintah dalam merespons dan menindaklanjuti masalah yang dilaporkan. Aplikasi Open Data memberi akses terbuka kepada publik terhadap data pemerintah, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas serta mendukung perencanaan dan penelitian berbasis data. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH/JDIHN) menyediakan informasi hukum yang dapat diakses oleh masyarakat, mendukung pemahaman yang lebih baik tentang peraturan daerah dan memastikan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Aplikasi PPDB Online memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendaftar ke sekolah negeri dengan proses yang lebih transparan, efisien, dan minim penyalahgunaan. Dengan adanya aplikasi OSS dan APRIZOB, proses perizinan dan investasi menjadi lebih mudah, cepat, dan terstruktur, mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara lebih transparan. Sementara itu, aplikasi Merapi, yang berfungsi sebagai aplikasi rekam medis, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kesehatan dengan mempermudah pencatatan serta pengelolaan data medis pasien. Secara keseluruhan, aplikasi-aplikasi ini berpotensi besar untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam layanan publik.

Disisi lain, Kabupaten Wonosobo sesungguhnya sudah tidak memiliki kelemahan, namun diantara 8 aspek, dua aspek terendahnya adalah aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Pelaksanaan Audit TIK, yaitu Pembangunan Aplikasi SPBE, Layanan Pusat Data, Layanan Jaringan Intra, Penggunaan Sistem Penghubung Layanan, Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE, Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE, dan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE . Bagaimanapun juga akan lebih baik jika direview dan dievaluasi pelaksanaannya.

Pembangunan Aplikasi SPBE yang tidak direview dan dievaluasi dapat mengakibatkan aplikasi yang dibangun tidak sesuai dengan kebutuhan fungsional, hal ini akan berpotensi mengganggu kelancaran operasional instansi. Layanan Pusat Data yang tidak dievaluasi dapat berisiko terhadap kerusakan atau kehilangan data akibat infrastruktur yang tidak optimal. Kualitas layanan yang buruk, seperti kecepatan akses yang rendah atau kegagalan dalam pemeliharaan, dapat mempengaruhi ketersediaan data yang sangat dibutuhkan untuk pengambilan keputusan dan pelayanan publik. Selain itu, jika infrastruktur pusat data tidak dievaluasi secara berkala, potensi kerentanannya terhadap serangan siber atau kegagalan sistem menjadi lebih tinggi.

Layanan Jaringan Intra yang tidak dievaluasi berisiko menyebabkan gangguan komunikasi antar instansi, yang akan menghambat efisiensi kerja dan menyebabkan keterlambatan dalam pengolahan informasi. Tanpa review, jaringan yang digunakan mungkin tidak memiliki kapasitas yang memadai untuk mendukung kebutuhan komunikasi yang terus berkembang, atau memiliki masalah keamanan yang bisa mengancam kerahasiaan data. Penggunaan Sistem Penghubung Layanan yang tidak dievaluasi dapat mengakibatkan ketidakcocokan antar sistem yang saling terhubung. Tanpa evaluasi, sistem tersebut mungkin tidak dapat mentransfer data dengan akurat atau tepat waktu, yang pada akhirnya menghambat kolaborasi antar instansi dan pengiriman layanan publik. Hal yang sama, Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE yang tidak dilakukan secara berkala dapat menyebabkan masalah teknis yang terabaikan, seperti ketidakcocokan perangkat keras, perangkat lunak, atau konfigurasi yang tidak sesuai dengan standar yang berlaku. Hal ini bisa berdampak langsung pada kinerja operasional dan mempengaruhi kemampuan sistem untuk mendukung tugas-tugas administrative.

Pemerintah Kabupaten Wonosobo telah mengimplementasikan berbagai aplikasi layanan publik berbasis elektronik untuk meningkatkan efektivitas pelayanan. SPAN LAPOR memfasilitasi pengaduan masyarakat terkait layanan publik secara langsung dan transparan. Optimalisasi layanan aplikasi SPAN LAPOR mempermudah pengguna menyampaikan pengaduan dan memastikan Pemerintah Kabupaten Wonosobo merespons masalah secara cepat dan transparan. Open Data memberikan akses publik terhadap data pemerintah untuk meningkatkan transparansi dan mendukung penelitian. JDIH menyediakan informasi hukum untuk pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan daerah. PPDB Online mempermudah proses pendaftaran sekolah secara transparan dan efisien. OSS dan APRIZOB menyederhanakan proses perizinan dan investasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Aplikasi Merapi, sebagai aplikasi rekam medis, meningkatkan efisiensi layanan kesehatan melalui pengelolaan data medis pasien. Seluruh aplikasi ini meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas pelayanan publik.

Rekomendasi

Audit Aplikasi SPBE yang tidak dilaksanakan berisiko menyebabkan aplikasi yang digunakan mengandung bug, kerentanan, atau tidak berfungsi secara optimal. Ketidakmampuan untuk mengidentifikasi masalah pada aplikasi dapat menyebabkan gangguan operasional, dan meningkatkan risiko kesalahan. Dengan audit yang tepat, masalah tersebut dapat ditemukan lebih awal dan diperbaiki sebelum berdampak besar. Terakhir, jika Audit Keamanan SPBE tidak dilakukan secara menyeluruh, kerentanannya terhadap ancaman siber seperti peretasan, kebocoran data, atau serangan malware akan meningkat. Data sensitif yang tidak terlindungi dengan baik dapat jatuh ke tangan yang salah, merusak reputasi instansi, dan mengancam privasi masyarakat. Audit keamanan membantu memastikan bahwa sistem terlindungi dari potensi ancaman dan memenuhi standar keamanan yang diperlukan untuk menjaga integritas dan kerahasiaan data. Ketiadaan review dan evaluasi dapat menyebabkan pelayanan publik menjadi tidak efektif, dan membutuhkan Waktu lebih lama. Dampak jangka panjangnya meliputi kehilangan kepercayaan masyarakat.

Perolehan Nilai Tingkat Kematangan Indikator

Target nilai tingkat kematangan untuk setiap indikator adalah minimal 3 (tiga)

No	Indikator	Nilai Tingkat Kematangan 2024
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi	5
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi	3
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	5
4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	3
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	3
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi	4
7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung	4
8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	4
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	3
10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi	3
11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	3
13	Tingkat Kematangan Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE	3
14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	2
15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	3
16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	3
17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah	3
18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi	3
19	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Tim Koordinasi SPBE Instansi	3
20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	4
21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	3
22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	2
23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	2
24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	2
25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia	2
26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	2
27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	3
28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	3
29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	3
30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	3
31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	3
32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	5
33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	5
34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	5
35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	5
36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	5
37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	5
38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah	4
39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	3
40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	3
41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	5

42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	5
43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	5
44	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi	5
45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	5
46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	5
47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	5



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI



Sinergi untuk Indonesia Maju

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
2024